

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku dan Jurnal

Amelia, P. (2019). EFEKTIVITAS PENATAUSAHAAN ASET TETAP DAN PENERAPANNYA MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) PADA UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

Creswell, J. W. (1994). *Research design: Qualitative and quantitative approaches*. California: SAGE Publications.

Nyita, F. (2016). ANALISIS AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NOMOR 07 DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado).

Warella, Y. (2004). KEPENTINGAN UMUM DAN KEPENTINGAN PERSEORANGAN (Ditinjau dari aspek Kebijakan Publik). "Dialogue" *JIAKP, Vol. 1, No. 3,*, 381-391.

### 2. Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2013). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2013). Surat Keputusan Dirjen Bina Marga Nomor 16/KPTS/DB/2013 tentang Penetapan Penetapan Struktur Organisasi dan Pembantu Pejabat Inti Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) dan Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Direktorat Je.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

### **3. Dokumen Publik**

- BPK RI. (2016). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 (Audited).
- BPK RI. (2017). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 (Audited).
- BPK RI. (2018). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited).
- BPK RI. (2019). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 (Audited).
- BPK RI. (2020). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited).
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2014). Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akreal.
- Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Jawa Timur. (2020). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2020*. Sidoarjo.
- Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Jawa Timur. (2020a). *Catatan atas Laporan Barang Milik Negara Tahun 2020*.
- Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Jawa Timur. (2020b). *Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020*.

- Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Jawa Timur. (2020c). *Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 DAN 2019.*
- Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Jawa Timur. (2020d). *Neraca Per 31 Desember 2020 dan 2019.*
- Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Jawa Timur. (2020e). *Laporan Operasional untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 DAN 2019.*
- Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Jawa Timur. (2020f). *Neraca Percobaan Per 31 Desember 2020.*
- Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Jawa Timur. (2020g). *LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG TAHUN ANGGARAN 2020.*